
**PENGARUH REALISASI BELANJA DAERAH DAN ANGKATAN
KERJA TERHADAP PERKEMBANGAN PDRB
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2004-2013**

*THE EFFECT OF REALIZATION OF THE LOCAL EXPENDITURE
AND LABOR FORCE AGAINST THE DEVELOPMENT OF GDRP
OF THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI IN 2004-2013*

Juliana Ruth Sumual, Rosalina A.M. Koleangan dan Agnes L. Ch. P. Lapijan

Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95114, Indonesia

E-mail: sumualrjuliana@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Salah satu ukuran kuantitas yang diperlukan untuk memberikan gambaran pembangunan ekonomi tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam masa yang akan datang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh belanja daerah dan angkatan kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara. Model analisis yang digunakan analisis regresi berganda dengan data sekunder dari badan pusat statistik. Hasil analisis menunjukkan Belanja daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Angkatan kerja secara statistik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Angkatan Kerja, PDRB

ABSTRACT

The plan of economic development of an area needs various statistical data for the basic determination of strategies and policies, so that the goals of the development can be reached rightly. One measure of the quantity which is required to provide a description of economic development of the situation in the past and present, as well as future goals to reach is the Gross Domestic Regional Bruto (GDRP). The expenditure policy of the government can directly stimulate the economic growth which is in the budget as this variable is actualized in the form of the development of economic and social infrastructure. This study is aimed at investigating the influence of the local expenditure and the labor force to the GDRP at Province North Sulawesi. The model analysis used is the multiple regression model with a secondary data analysis from the central statistical agency. The results of the analysis showed that Local Expenditure statistically affects positively and significantly on the GDRP. The Labor Force statistically affects negatively and insignificantly on the GDRP in the province of North Sulawesi.

Keywords: Local Expenditure, Labor Force, GDRP

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi sejak Pelita I hingga krisis tahun 1997 memang memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya. Jika dilihat dari sisi kualitasnya ternyata proses pembangunan ekonomi selama orde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar baik dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar daerah atau provinsi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk suatu wilayah. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi termaju di Kawasan Timur Indonesia. Banyak perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Saat ini provinsi Sulawesi Utara memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia kedua tertinggi di Indonesia dengan angka kemiskinan yang rendah dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Dalam sepuluh tahun terakhir PDRB riil per kapita meningkat dua kali lipat dan belanja Pemerintah Daerah meningkat dengan signifikan.

Dalam rangka mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, serta meningkatkan kinerja pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Provinsi perlu berupaya lebih keras dalam memanfaatkan sumber daya fiskal yang dimilikinya. Upaya dalam memperjelas visi, misi, indikator dan target pembangunan perlu dilakukan dan diiringi dengan upaya yang lebih keras untuk menyusun anggaran yang lebih terarah, serta merumuskan program dan kegiatan yang lebih berkualitas dan konsisten dengan target yang dicanangkan.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki PDRB meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
Sulawesi Utara	17149.62	18376.82	19735.47	21286.58	22872.16
Sulawesi Tengah	16207.60	17624.17	19230.92	21007.97	22979.40
Sulawesi Selatan	47326.08	51199.90	55093.74	59718.50	64284.43
Sulawesi Tenggara	10768.58	11653.91	12698.12	14020.35	15040.86
Gorontalo	2710.74	2917.49	3141.46	3383.82	3646.55
Sulawesi Barat	4239.46	4743.66	5233.06	5704.33	6112.65

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Tabel 1.1 Provinsi Sulawesi Utara mendapat peringkat kedua dari enam Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi yang bisa kita lihat bersama bahwa Sulawesi Selatan sangat mengungguli yaitu tepat di peringkat pertama untuk PDRB di Pulau Sulawesi. Diikuti dengan Sulawesi Tengah, disusul Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat selanjutnya Gorontalo.

Ada sembilan sektor atau lapangan usaha terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Sektor primer: a) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. b) Pertambangan dan penggalan. 2)

Sektor sekunder: a) Industri pengolahan. b) Listrik, air, dan gas. c) Bangunan. 3) Sektor tersier: a) Perdagangan, hotel, dan restoran. b) Pengangkutan dan telekomunikasi. c) Jasa lain-lain.

Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun 2004-2013 merupakan lanjutan dari publikasi yang sama tahun-tahun sebelumnya. Dalam publikasi ini, data PDRB disajikan dalam bentuk tabel pokok Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. Output dalam suatu proses produksi selama satu tahun, seluruh nilai harga produsen barang/jasa yang diproduksi dinamakan output. Secara teknis penghitungan ini adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga atau tarif jual dari produsen barang atau jasa tersebut. Lapangan usaha sektor pertanian di Sulawesi Utara menduduki posisi pertama untuk perkembangan PDRB di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun. Lapangan usaha sektor perdagangan, hotel dan restoran di tahun 2013 naik drastis dan mencapai perolehan lebih tinggi dari setiap lapangan usaha sektor lainnya.

Struktur perekonomian Sulawesi Utara didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, angkutan dan telekomunikasi, serta jasa-jasa. Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasimasih rendah, bahkan industri pengolahan sendiri hanya berkontribusi sebesar 9 persen, sementara dukungan sektor utilitas untuk industri berkontribusi sangat kecil di bawah 1 persen.

Todaro (1997:18) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan besar di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Mangkoesobroto (1998) Peran Pemerintah yang harus dijalankan adalah: 1) Peran alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh pihak swasta. 2) Peranan distribusi yaitu melalui kebijakan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu. 3) Peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan guncangan ekonomi yang berlebihan.

Realisasi belanja daerah terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di Provinsi Sulawesi Utara belanja daerah oleh pemerintah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2004 belanja daerah provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,5%, tahun 2005 naik lagi menjadi 4,1%, tahun 2006 belanja daerah sebesar 5,7%, tahun 2007 sebesar 6,7%, selanjutnya di tahun 2008 naik lagi sebesar 10,7%, tahun 2009 sebesar 11,2%, tahun 2010 sebesar 11,9%, tahun 2011 sebesar 11,7%, tahun 2012 sebesar 16,1% dan di tahun 2013 pun belanja daerah naik sebesar 18,3%.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan PDRB adalah sumber daya manusia yang terefleksikan dengan penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, namun disisi lain, penduduk yang bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di provinsi Sulawesi Utara tahun 2004 sampai 2013 pun terus meningkat di tiap tahunnya. Tahun 2004 sebesar 9,8%, tahun 2003 sebesar 9,6%, tahun 2006 sebesar 9,5%, tahun 2007 sebesar 9,6%, tahun 2008 sebesar 10,1%, tahun 2009 sebesar 10%, tahun 2010 naik sebesar 10,3%, di tahun 2012 pun naik lagi sebesar 10,6%, terakhir di tahun 2013 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yaitu 10,2%.

Masalahnya bagaimanakah pengaruh belanja daerah terhadap perkembangan PDRB di provinsi Sulawesi Utara. Kedua, bagaimanakah pengaruh angkatan kerja terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa

$$Y = C + I + G + X - M$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G menyatakan pengeluaran pemerintah (*Goverments Expenditures*), I Investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: (Boediono, 1999), a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung, c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer *payment*. Teori Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P}{P} < \frac{P}{P} < \frac{2}{P} \dots < \frac{P}{P}$$

Dimana PkPP atau dengan kepanjangan Pengeluaran pemerintah per kapita, PPK atau Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk, 1,2,...n atau dengan kata lain jangka waktu (tahun).

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Hubungan Angkatan Kerja dengan PDRB

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti besekolah dan mengurus rumah tangga. . Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Sumber daya atau input dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja dan kemampuan manajerial, modal (*capital*), tanah ataupun sumber daya alam.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah. (Kuncoro, 2004).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB

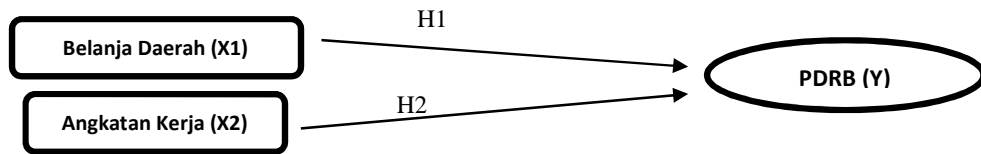
Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah), klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Maka pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah PDRB) meningkat pula.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2011) berjudul “Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal” yang bertujuan pertama, menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Kedua, menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Ketiga, menganalisis pengaruh PDRB terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Keempat, menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan hasil penelitiannya PDRB, dana perimbangan, dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Penelitian terdahulu dari Winda Srilianti Mamonto (2013) dengan judul penelitian “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tenaga kerja pengaruhnya terhadap PDRB kota Kotamobagu periode 2002-2011” tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di Kota Kotamobagu. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di kota Kotamobagu. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa pertama, PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB. Kedua, tenaga kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis dari penelitian ini H1 : Diduga belanja daerah berpengaruh positif terhadap perkembangan PDRB di provinsi Sulawesi Utara. H2 : Diduga angkatan kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan PDRB di provinsi Sulawesi Utara.

2. METODE PENELITIAN

Data sekunder adalah yang dipakai dalam melakukan penelitian atau data secara runtut waktu (*time series*), data yang dikumpulkan 10 tahun terakhir (2004-2013) dari lembaga atau badan instansi yang ada kaitannya dengan topik penelitian yaitu kantor Badan Pusat Statistika (BPS). Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan analisis model regresi berganda (*multiple regression*). Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam analisa.

Model ini memperlihatkan hubungan dua variabel. Variabel bebas (*Independent Variable*) yaitu belanja daerah dan angkatan kerjadengan variabel terikat (*Dependent Variable*) yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan permasalahan yang dikemukakan dapat dilihat melalui persamaan fungsi:

$$Y = f(X1, X2)$$

Fungsi di atas kemudian di estimasi ke dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut.

$$Y = \mu + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

- Dimana :
- Y : PDRB
 - X1 : Belanja Daerah
 - X2 : Angkatan Kerja
 - μ : Error
 - 0 : Konstanta
 - 1, 2 : Parameter yang akan diestimasi
 - μ : Kesalahan Random

Pengujian atas model tersebut di atas dilakukan dengan criteria statistik, yang dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji serempak (Uji F), dan Uji Parsial (Uji t). Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variable bebas dapat menjelaskan variasi variable terikat. Uji secara parsial dilihat dari nilai *probabilitas-stat*-nya, sedangkan untuk uji secara serempak, yakni dengan melihat nilai *probabilitas F-stat*-nya. Kedua probabilitas uji ini dibandingkan dengan taraf nyata, maka variable bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat lainnya.

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Artinya apakah suatu variable independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variable tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Artinya variable tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen (Imam Gozhali, 2009). Untuk menguji pengaruh variable independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat dari nilai probabilitas t statistic dari hasil regresi. Apabila nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari alfa yang ditentukan ($\alpha = 5\%$) maka variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. Begitupun sebaliknya, bila nilai t-statistik lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka variable independen tidak signifikan terhadap variable dependen.

Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

$$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0 \text{ semua variabel independen tidak mempengaruhi variable dependen secara bersama-sama}$$

$$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0 \text{ semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama}$$

Nilai F-hitung dicari dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)}$$

Dimana : R^2 = Koefisien determinasi
 N = Jumlah observasi
 k = Jumlah variabel

Koefisien determinasi (R^2) disebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula :

$$R^2 = \frac{B_1 Y_1 X_1 + B_2 Y_2 X_2 + \dots + B_k Y_k X_k}{B Y}$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrasi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linear klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Inilah yang disebut asumsi *heteroskedasticity* atau varian yang sama.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang di dapat dalam Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Anggaran Kerja Terhadap Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2004-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas Data

		PDRB	Belanja Daerah	Angkatan Kerja
N		10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7.2157	9.0437	Normal Parameters ^{a,b}
	Std. Deviation	.09620	.24633	
Most Extreme Differences	Absolute	.130	.238	Most Extreme Differences
	Positive	.130	.110	
	Negative	-.096	-.238	
Test Statistic		.130	.238	.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.114 ^c	.200 ^{c,d}

*) **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Sumber Data : *Pengolahan Data 2015*

Berdasarkan tabel ini maka terlihat bahwa nilai uji kolmogorov-smirnov test menunjukkan bahwa nilai uji masing-masing variabel adalah 0.114 belanja daerah, 0.200 angkatan kerja, dan 0.200 PDRB. Nilai kolmogorov-smirnov masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Tabel 3. Multikolerasi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Belanja Daerah	.355	2.814
Angkatan Kerja	.355	2.814

*) **Coefficients**

Sumber Data : *Pengolahan Data 2015*

Berdasarkan hasil perbaikan model penelitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas maka : Bila $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi gejala multikolerasi bila $VIF > 10,00$ maka terjadi gejala multikolerasi. Dengan hasil :

Nilai t *Tolerance* : X1 belanja daerah = 0,355
 : X2 angkatan kerja = 0,355
 Nilai VIF : X1 belanja daerah = 2.814
 : X2 angkatan kerja = 2.814

Aturan dalam program SPSS bahwa jika nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari angka 10, maka kedua variabel tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

Dari diagram uji Heterokedastisitas bahwa penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut terlihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.963 ^a	.927	.907	.02770	1.197

*) *Model Summary*

Sumber Data : *Pengolahan Data 2015*

Hasil analisis dalam tabel ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 0,613. Dengan jumlah variabel bebas (k) = 2 dan jumlah sampel (n) = 14 pada $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai d_L sebesar 0.610 dan nilai d_U sebesar 1.400. Melalui aturan pengujian : $d_L < d_w < d_U$ yakni $0,610 < 1,197 < 1,400$. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.963	5.347		.180	.862
	Belanja Daerah	.325	.063	.882	5.162	.001
	Angkatan Kerja	.553	.964	.098	.574	.584

*) *Coefficients*

Sumber Data : *Pengolahan Data 2015*

Dapat dilihat pada tabel 4.7 coefficients (a). Menentukan besarnya taraf signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 10 - (2+1) = 7$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,894 (untuk uji dua arah). Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel *Coefficients* di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya pengaruh linear variabel independen belanja daerah dan variabel dependen PDRB ialah 5.162. Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $5.162 > t$ tabel sebesar 1,894. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh linear variabel independen belanja daerah terhadap variabel dependen PDRB. Maka variabel independen belanja daerah berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel *coefficients* di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya pengaruh linear variabel independen angkatan kerja dan terhadap variabel dependen PDRB ialah 0,574. Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $0,574 < t$ tabel sebesar 1,894. Dengan demikian keputusannya ialah H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh linear variabel independen angkatan kerja terhadap variabel dependen PDRB. Maka variabel independen angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Tabel 6. Uji Korelasi, Kontribusi dan Pengaruh Simultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.963 ^a	.927	.907	.02770	.927	44.632

*) *Model Summary*

Sumber Data : *Pengolahan Data 2015*

Besarnya R square (R²) pada tabel dibawah ini adalah 0,927. Angka tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh variabel independen belanja daerah dan angkatan kerja secara bersama-sama terhadap variabel dependen PDRB. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,927 \times 100\%$$

$$KD = 92,7\%$$

Besarnya pengaruh variabel independen belanja daerah dan angkatan kerja secara gabungan terhadap variabel dependen PDRB secara gabungan adalah 92,7%.

Dan pengaruh diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,927$$

$$e = 0,073 \times 100\%$$

$$e = 7,3\%$$

Yang berarti 7,3 % berarti besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen belanja daerah dan angkatan kerja secara gabungan terhadap variabel dependen PDRB adalah sebesar 92,7%, sedangkan pengaruh sebesar 7,3% disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti.

Tabel 7 Kelayakan Model Regresi

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.079	2	.040	44.632	.000 ^b
	Residual	.004	7	.001		
	Total	.083	9			

*) *ANOVA*

Sumber Data : *Pengolahan Data 2015*

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar 44.632 > F tabel sebesar 4,737. Dengan demikian H₀ ditolak, dan H₁ diterima. Artinya ada hubungan linier antara variabel independen belanja daerah dan angkatan kerja dengan variabel dependen PDRB. Dengan nilai sig 0,000 kesimpulan adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil regresi, variabel belanja daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien regresi untuk variabel belanja daerah menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 5,162. Hal ini berarti bahwa jika belanja daerah naik sebesar 1% maka PDRB di provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar 5,162%. Variabel belanja daerah sudah sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2011) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Output atau PDRB.

Berdasarkan hasil regresi, variabel angkatan kerja secara statistik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien regresi untuk variabel angkatan kerja menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar 0.574. Hal ini berarti bahwa jika angkatan kerja naik sebesar 1% maka PDRB di provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar 0.574%.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Utara. Hal ini berarti semakin tinggi belanja daerah maka semakin tinggi pula PDRB.
2. Angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti semakin tinggi penyerapan angkatan kerja maka semakin tinggi pula PDRB.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan kesimpulan dari penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara harus terus meningkatkan PDRB di provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah juga disarankan untuk memperhatikan angkatan kerja yang ada di provinsi Sulawesi Utara.
3. Dalam penelitian selanjutnya, perlu adanya penambahan variable makro ekonomi lain yang kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agar model estimasi dapat lebih dipercaya dan mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.
- [2] Berita Resmi Statistik (BRS) 2009-2013.,2014, Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara
- [3] Data APBD, 2014,*Financial Statistic Of Province Government 2009-2013*. Badan Pusat Statistik
- [4] Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2003-2013., 2014, Badan Pusat Statistik, Sulawesi Utara.
- [5] Kuncoro, Mudjarat, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- [6] Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) Untuk Ekonomi dan Bisnis.,2002, Edisi Kedua.
- [7] Mujis Daniel, 2004, *Doing Quantitive Research in Education with SPSS* (London: SAGE Publication Ltd.)
- [8] Mangkoesoebroto, Guritno dan Algifari, 1998. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: STIE YKPN. Edisi 3.
- [9] Mamonto S. Winda, 2013. "Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Periode 2002-2011". Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 4 Desember 2013 Hal. 1198-1207.
- [10] Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Seri Analisa Pembangunan Daerah
- [11] Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. (2001). Makro-Ekonomi. Edisi.

- [12] Sasana Hadi, 2011. “Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Vol. 18, No. 1, Hal. 46-58.
- [13] Sukirno, Sadono, 2002, Pengantar Teori Mikro ekonomi, edisi ke 3, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- [14] Sukirno, Sadono. 2000. Yogyakarta. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE. 7.
- [15] Todaro P. Michael, 1997. “*Economic Development*”. Addison-Wesley
- [16] Todaro. M.P, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.